



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU
KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEDAGANG PASAR INDUK NANGA
BULIK DAN PASAR RAKYAT NANGA BULIK 1 (SATU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

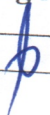
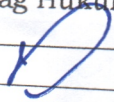


BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional dan mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau, diperlukan langkah-langkah kebijakan khususnya di bidang perekonomian, dan sektor perdagangan untuk menghadapi pemulihan perekonomian dan/atau stabilitas sebagai kesinambungan dari kebijakan sebelumnya;
 - b. bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan iklim dunia usaha pasca pandemi COVID-19 dilakukan perpanjangan pengurangan atau keringanan terhadap nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (satu) sehingga pedagang dapat memenuhi kewajiban dalam pembayaran retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan Atau Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (satu);

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 728);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu) (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 783) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

The text is extremely faint and illegible, appearing to be the beginning of a document or report.

The text is extremely faint and illegible, appearing to be the beginning of a document or report.

The text is extremely faint and illegible, appearing to be the beginning of a document or report.

The text is extremely faint and illegible, appearing to be the beginning of a document or report.

The text is extremely faint and illegible, appearing to be the beginning of a document or report.

The text is extremely faint and illegible, appearing to be the beginning of a document or report.

The text is extremely faint and illegible, appearing to be the beginning of a document or report.

Category	Value/Text
Item 1	Faint text or number
Item 2	Faint text or number
Item 3	Faint text or number

Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu) (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 807);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEDAGANG PASAR INDUK NANGA BULIK DAN PASAR RAKYAT NANGA BULIK 1 (SATU).

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan Atas Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk Nanga Bulik Dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu) (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 783), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu) (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 807), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


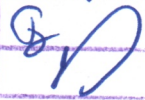

Pasal 4

Pemberian pengurangan atau keringanan terhadap nilai SKRD bagi pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1, dihitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH